



## Evaluasi Kebijakan Program Kampung Iklim (ProKlim) Mendukung Pencapaian SDGS

(Studi Kasus RW 03 Jambangan, Kota Surabaya)

Blezend Syahrira Rona MayNando<sup>1</sup>, Salma Shadiyah<sup>2</sup>, Yesha Verlita Evelin<sup>3</sup>,  
Ahmad Fikri Naufal Akbar<sup>4</sup>, Nadia Ayu Ardiani<sup>5</sup>, Tauran<sup>6</sup>, Wilda Sumarsyah<sup>7</sup>  
Universitas Negeri Surabaya, Indonesia<sup>1-7</sup>

Email Korespondensi: [24040674163@mhs.unesa.ac.id](mailto:24040674163@mhs.unesa.ac.id), [24040674167@mhs.unesa.ac.id](mailto:24040674167@mhs.unesa.ac.id),  
[24040674166@mhs.unesa.ac.id](mailto:24040674166@mhs.unesa.ac.id), [24040674156@mhs.unesa.ac.id](mailto:24040674156@mhs.unesa.ac.id), [24040674129@mhs.unesa.ac.id](mailto:24040674129@mhs.unesa.ac.id),  
[tauran@unesa.ac.id](mailto:tauran@unesa.ac.id), [wildasumarsyah@unesa.ac.id](mailto:wildasumarsyah@unesa.ac.id)

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 13 Mei 2026

### ABSTRACT

Climate change, as a serious global issue, has prompted the Indonesian government to implement the Climate Village Program (ProKlim) as a community-based adaptation and mitigation strategy. This research evaluates the implementation of ProKlim in RW 03 Jambangan, Surabaya which has pioneered independent environmental management since 2002 with the aim of identifying and analyzing the policy's role in supporting the Sustainable Development Goals (SDGs) at the local level. A descriptive qualitative approach was employed using William N. Dunn's policy evaluation criteria, including effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness; data were collected through semi-structured interviews, observation, and documentation. ProKlim in RW 03 proved to be highly effective, characterized by integrated waste management systems across all neighborhood units (RT), the use of renewable energy via solar panels, and an 80% environmental problem resolution rate. The program also demonstrates equity through the inclusive participation of the PKK (Family Welfare Movement) and youth groups, providing significant economic impacts for residents. In 2021, RW 03 achieved the "ProKlim Lestari" status, the highest national award. The study concludes that the success of ProKlim was driven by long-term bottom-up community initiatives, proving that strong local participation is the primary factor in achieving SDGs 13.

**Keywords:** ProKlim, Policy Evaluation, SDGs, Community Participation, Jambangan.

### ABSTRAK

Perubahan iklim sebagai isu global serius mendorong Pemerintah Indonesia menerapkan Program Kampung Iklim (ProKlim) sebagai strategi adaptasi dan mitigasi berbasis masyarakat. Penelitian ini mengevaluasi implementasi ProKlim di RW 03 Jambangan, Surabaya yang merintis pengelolaan lingkungan mandiri sejak 2002 dengan tujuan mengidentifikasi dan menganalisis peran kebijakan tersebut dalam mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) tingkat lokal. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dengan kriteria evaluasi William N. Dunn, meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, ekuitas, responsivitas, dan ketepatan; pengumpulan data melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, serta dokumentasi. ProKlim di RW 03 terbukti sangat efektif, dengan sistem pengelolaan sampah terintegrasi di semua RT, penggunaan energi terbarukan

---

melalui panel surya, serta resolusi masalah lingkungan hingga 80%. Program ini menunjukkan ekuitas lewat partisipasi inklusif PKK dan karang taruna, yang memberi dampak ekonomi signifikan bagi warga. Tahun 2021, RW 03 memperoleh predikat "ProKlim Lestari" sebagai penghargaan nasional bergengsi. Kesimpulannya, sukses ProKlim didorong inisiatif bottom-up masyarakat jangka panjang, membuktikan partisipasi lokal kuat sebagai faktor utama capaian SDGs 13.

**Kata Kunci:** Proklim, Evaluasi Kebijakan, SDGs, Partisipasi Masyarakat, Jambangan.

## PENDAHULUAN

Kondisi cuaca rata-rata yang diamati dalam jangka waktu yang panjang dan di wilayah geografis yang luas dikenal sebagai iklim. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendefinisikan iklim sebagai kondisi cuaca rata-rata yang berlangsung setidaknya selama 30 tahun dan mencakup variabel-variabel penting seperti suhu, curah hujan, kelembapan, dan pola angin. Isu perubahan iklim telah berkembang menjadi perhatian global yang mendesak seiring berjalannya waktu, dengan dampak nyata seperti kenaikan suhu permukaan global, terjadinya peristiwa cuaca ekstrem, dan kenaikan permukaan laut. Dampak perubahan iklim di Indonesia meliputi kenaikan suhu udara akibat pemanasan global serta peristiwa seperti El Niño dan Indian Ocean Dipole (IOD), pola curah hujan yang tidak menentu, peningkatan frekuensi dan tingkat keparahan cuaca ekstrem, serta risiko banjir dan kekeringan yang lebih tinggi. Akibatnya, pertanian terganggu, ketahanan pangan memburuk, bahaya bencana hidrometeorologi meningkat, dan kerusakan lingkungan semakin parah (Adrian, 2025). Selain menimbulkan risiko signifikan terhadap kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, dan kemajuan ekonomi secara umum, peristiwa-peristiwa ini dapat mengancam kelangsungan hidup semua ekosistem makhluk hidup dalam jangka panjang.

Program Kampung Iklim (Proklim) merupakan salah satu program strategis yang diluncurkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai respons terhadap perubahan iklim. Program tingkat nasional ini berfokus pada peningkatan keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah dalam adaptasi perubahan iklim, serta pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) secara berkelanjutan. Secara khusus, Proklim bertujuan untuk mencapai empat sasaran utama: (1) meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mempersiapkan diri menghadapi perubahan iklim; (2) mendukung kegiatan masyarakat lokal untuk pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan; (3) memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap upaya Indonesia dalam mengurangi emisi GRK; dan (4) meningkatkan ketahanan iklim di wilayah-wilayah yang berisiko. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim memperkuat pelaksanaannya dengan mengatur proses, pengajuan, arahan, evaluasi, dan kategorisasi program tersebut.

Hadirnya program kampung iklim (proklim) juga berkaitan dengan tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Proklim berkontribusi dengan SDGs 13 yaitu *climate action* (Penanganan perubahan iklim).

---

SDGs 13 bertujuan untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya, Dengan target utama seperti: (1) meningkatkan ketahanan dan kapasitas adaptasi terhadap risiko terkait iklim dan bencana alam; (2) memasukkan kebijakan mitigasi perubahan iklim ke dalam strategi, kebijakan, dan perencanaan nasional; serta (3) meningkatkan pendidikan, kesadaran publik, dan kapasitas individu serta lembaga terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak, dan sistem peringatan dini terkait perubahan iklim, SDG 13 menekankan urgensi tindakan segera untuk mengatasi perubahan iklim dan konsekuensinya. Selain itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 memprioritaskan kebijakan perubahan iklim dengan menerapkan strategi pembangunan rendah karbon yang menekankan pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) guna memitigasi laju kenaikan suhu global, perubahan iklim, dan dampaknya. Selain itu, Proklamasi juga mendorong pencapaian SDGs 3 (Kehidupan sehat dan sejahtera), SDGs 6 (air bersih dan sanitasi layak), SDGs 11 (kota dan pemukiman berkelanjutan), SDGs 12 (pola konsumsi dan produksi bertanggung jawab), serta SDGs 15 (ekosistem daratan) (Aditya et al., 2025).

Program Kampung Iklim (Proklamasi) berfokus pada dua kegiatan utama yaitu adaptasi perubahan iklim dan mitigasi perubahan iklim. Adaptasi perubahan iklim mencakup langkah-langkah untuk mengatasi dampak perubahan iklim yang tak terhindarkan, seperti pengelolaan sumber daya air, peningkatan ketahanan pangan, perlindungan kesehatan masyarakat, dan pengurangan risiko bencana. Sementara itu, mitigasi perubahan iklim memprioritaskan pengurangan atau pencegahan emisi gas rumah kaca (GRK) melalui strategi seperti pengelolaan sampah terpadu, peningkatan efisiensi energi dan pemanfaatan energi terbarukan, serta inisiatif penghijauan dan konservasi. Kelompok sasaran program ini Adalah Komunitas masyarakat yang secara aktif terlibat dalam upaya adaptasi dan mitigasi iklim, seperti kecamatan, desa, dan kelompok RT/RW, yang memiliki potensi dan komitmen tinggi untuk menjadi komunitas yang tangguh terhadap perubahan iklim. Upaya pemerintah dalam mendukung pelaksanaan program proklamasi juga diwujudkan dalam dukungan anggaran yang diperuntukkan pemerintah terhadap perubahan iklim, disebutkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 BAB V Pasal 18 terkait pembiayaan bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk keseluruhan proklamasi berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber lainnya. Selain itu, berdasarkan alokasi anggaran dalam DIPA petikan Sekretariat Utama KLHK/BPLH tahun anggaran 2026, dialokasikan sebesar Rp58.790.177.000 untuk program perubahan iklim dan ketahanan bencana. Anggaran tersebut kemudian digunakan untuk berbagai proyek strategis, termasuk pengelolaan kebakaran lahan (Rp22.045.507.000), adaptasi perubahan iklim (Rp9.443.305.000), mitigasi perubahan iklim (Rp14.951.765.000), inventarisasi dan pemantauan, pelaporan, serta verifikasi GRK (Rp2.813.285.000), mobilisasi sumber daya pengendalian perubahan iklim (Rp5.958.839.000), serta tata kelola implementasi nilai ekonomi karbon (Rp3.577.476.000).

---

Program Kampung Iklim (Iklim) diimplentasikan di seluruh daerah Indonesia terutama wilayah perkotaan yang memiliki tingkat resiko terhadap perubahan iklim. Salah satu kota yang menerapkan Program Kampung Iklim (Proklim) adalah Kota Surabaya. Program Kampung Iklim (Proklim) di Kota Surabaya menunjukkan perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hingga tahun 2023, tercatat sudah 38 lokasi kampung iklim yang tersebar di beberapa wilayah surabaya sehingga menjadi daerah dengan jumlah proklim terbanyak di indonesia. Selain itu, Pemerintah kota surabaya juga berhasil mendapatkan penghargaan dari Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan atas prestasi dalam mengimplementasikan proklim dengan kategori Lestari, Utama, dan Madya. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa proklim di Surabaya bukan hanya sekedar program pendamping saja, namun juga sebagai penggerak berbasis pemberdayaan masyarakat yang melibatkan partisipasi aktif di tingkat RT RW. Program ini mendorong kegiatan berbasis 3R, penghijauan, dan ketahanan pangan. Selain itu, program Kampung Iklim (Proklim) di Kota Surabaya juga diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 92 Tahun 2024 tentang Program Kampung Iklim di Kota Surabaya dengan Sumber pendanaan pelaksanaan program yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya serta sumber dana lain yang sah dan kontribusi CSR maupun swadaya masyarakat.

Salah satu wilayah di Kota Surabaya yang mengimplementasikan proklim adalah kelurahan jambangan khususnya di RW 03. Kegiatan pengelolaan lingkungan di RW 03 sudah dimulai sejak Tahun 2002 berdasarkan inisiatif para masyarakat untuk mengelola sampah secara mandiri dengan membangun Pusat Daur Ulang (PDU) sebagai sarana pengelolaan. Dari kegiatan tersebut, RW 03 disarankan oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk mengikuti Program Kampung Iklim (proklim) yang dinaungi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebagai kampung binaan dan sosialisasi awal oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya terkait program Kampung Iklim (proklim), kelurahan Jambangan khususnya di RW 03 mulai mendapatkan pembinaan secara intensif pada tahun 2017. Kegiatan sosialisasi dan pembinaan awal dimulai dari pembentukan kelompok kerja (Prokja) yang kemudian dilanjutkan pada proses perencanaan dan pengembangan program agar mampu memperkuat kelembagaan Masyarakat di Tingkat RW.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Program Kampung Iklim (Proklim) sudah banyak dievaluasi dari berbagai aspek dan keberlanjutannya. Pertama, pelaksanaan Proklim di kelurahan Margo Mulyo secara umum sudah berkategori cukup baik, tetapi masih ada tiga aspek yang belum terlalu memadai, yaitu aspek kecukupan, perataan, dan responsivitas. Selain itu, beberapa aspek lainnya juga masih perlu dioptimalkan lagi (Shaqnasia et al., 2024). Selanjutnya, nilai implementasi proklim di tingkat RW 09, kelurahan Pucangsawit berada dalam kategori sedang. Tingkat efektivitas program tersebut sudah cukup baik, terutama pada kegiatan adaptasi dan mitigasi. Oleh karena itu, ada beberapa strategi prioritas yang ditetapkan untuk meningkatkan pelaksanaan proklim, yaitu bekerja sama dengan pihak eksternal, membentuk kelompok relawan, membangun infrastruktur,

---

serta sosialisasi masyarakat (Indriyani et al., 2024). Sementara itu, pelaksanaan proklamasi di Kampung Airport mengalami penurunan karena kurangnya kelembagaan, sumber daya yang terbatas, serta partisipasi masyarakat yang rendah, sehingga diperlukan penguatan institusi dan keterlibatan stakeholder secara berkelanjutan di luar sertifikasi awal (Farid & Cadith, 2025). Berdasarkan penelitian sebelumnya, terlihat bahwa penelitian mengenai proklamasi masih berfokus pada pelaksanaan program, efektivitas kegiatan, dan partisipasi masyarakat. Namun, belum ada pembahasan menyeluruh mengenai evaluasi kebijakan secara komprehensif, serta terbatasnya pembahasan mengenai keterkaitan proklamasi dengan SDGs, terutama di tingkat lokal. Oleh karena itu, terdapat gap dalam penelitian yang memerlukan analisis lebih lanjut mengenai evaluasi kebijakan proklamasi dalam mendukung pencapaian SDGs, khususnya di tingkat lokal.

Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengidentifikasi pelaksanaan kebijakan Program Kampung Iklim (Proklamasi) dalam mendukung pencapaian SDGs di RW 03 Kelurahan Jambangan Kota Surabaya.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklamasi) dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dengan fokus pada pelaksanaan Proklamasi di RW 03 Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya sebagai lokasi penelitian. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini berperan sebagai instrumen utama yang secara langsung melakukan pengumpulan data di lapangan melalui interaksi dengan informan. Subjek penelitian mencakup pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Proklamasi, sedangkan informan ditentukan secara purposive, yaitu pengurus atau pelaksana Proklamasi di tingkat RW serta warga yang aktif berpartisipasi dan memiliki pemahaman terhadap jalannya program. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur yang didasarkan pada pedoman pertanyaan yang telah disusun. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen kebijakan, laporan kegiatan, serta literatur yang relevan, termasuk Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Program Kampung Iklim, serta referensi metodologi penelitian seperti Sugiyono (2018). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi secara mendalam terkait pelaksanaan program, sedangkan studi dokumentasi digunakan untuk memperkuat dan memvalidasi data yang diperoleh di lapangan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis ini dilakukan secara berkelanjutan sejak proses pengumpulan data hingga tahap akhir penelitian.

---

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara sistematis efektivitas, pemerataan, ketepatan, serta dampak pelaksanaan ProKlim di lokasi penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menggunakan enam standar evaluasi kebijakan yang diusulkan oleh William N. Dunn (2013), yakni efisiensi, efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan implementasi ProKlim di RW 03 Kelurahan Jambangan. Peneliti juga mengevaluasi apakah program ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* ke-13, yaitu tindakan perubahan iklim (*climate action*). Oleh karena itu, evaluasi tidak hanya melihat seberapa baik program dijalankan, tetapi juga bagaimana program membantu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di tingkat lokal.

### 1. Efektivitas

Pada dasarnya, evaluasi kebijakan menentukan seberapa efektif suatu kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Dunn (2013), efektivitas dapat diukur dengan membandingkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84 Tahun 2016 menetapkan tujuan utama ProKlim untuk mendorong masyarakat untuk melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan ketahanan lingkungan di tingkat lokal.

Hasil lapangan menunjukkan bahwa ProKlim di RW 03 Jambangan cukup efektif dalam beberapa hal. Untuk permulaan, setiap RT di RW 03 (RT 1 hingga RT 8) memiliki sistem pengelolaan sampah mandiri. Pemilahan sampah organik dan anorganik, keberadaan komposter, dan bank sampah di setiap RT adalah semua bagian dari sistem pengelolaan sampah. Sampah yang tidak dapat diolah secara mandiri kemudian dikirim ke Pusat Daur Ulang (PDU) Jambangan, yang dapat mengelola antara 5 dan 7 ton sampah per hari (Tribun Surabaya, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem yang dibangun sudah cukup terintegrasi memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat dan mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA.

Kedua, Menurut Djamaludin selaku ketua RW 03 Jambangan (wawancara pribadi, 21 April 2026) dari sisi aspek mitigasi gas rumah kaca, untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, RW 03 mengembangkan energi terbarukan dengan menggunakan solar cell di RT 05 yang dimanfaatkan operasional kafe dan pompa air cuci tangan, ini memungkinkan mereka untuk tidak sepenuhnya bergantung pada listrik PLN. Hal ini sejalan dengan tujuan program ProKlim untuk mitigasi perubahan iklim berdasarkan regulasi KLHK.

Ketiga, dari sisi ketahanan pangan, RW 03 membangun lahan pertanian yang menghasilkan jagung dan sayuran guna meningkatkan ketahanan pangan. Dengan bantuan dari Dinas Pertanian Kota Surabaya, masyarakat lokal dilibatkan dalam pengelolaannya, terutama kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah. Setelah panen, hasilnya digunakan dan dijual di lingkungan sekitar (Wawancara,

---

2024). Dalam hal menjaga ketahanan pangan lokal, program ini menunjukkan upaya adaptasi perubahan iklim.

Keempat, dari aspek kesehatan lingkungan, kondisi RW 03 tergolong baik. Ketua RW mengatakan bahwa tidak ada penyakit endemik yang signifikan di wilayah tersebut. Selain itu, setiap RT memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). IPAL ini memiliki kemampuan untuk mengolah limbah domestik menjadi air yang dapat digunakan kembali, seperti untuk penyiraman tanaman (Djamaludin, wawancara pribadi, 21 April 2026). Secara keseluruhan, pencapaian yang paling menunjukkan seberapa efektif program adalah penghargaan ProKlim Lestari dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2021. Penghargaan ini menunjukkan bahwa RW 03 Kecamatan Jambangan berhasil dalam pengelolaan lingkungan di wilayahnya sendiri dan dapat membina dan menerapkan sembilan RW lain di Kota Surabaya.

## 2. Efisiensi

Dalam kerangka Dunn (2013), kriteria efisiensi pada dasarnya membahas bagaimana upaya yang dilakukan dibandingkan dengan hasil yang dihasilkan. Artinya, suatu program dianggap efisien ketika jumlah sumber daya yang digunakan, baik dana maupun tenaga, dianggap sebanding dengan hasil yang dihasilkan. Dalam ProKlim di RW 03 Jambangan, pengelolaan sumber daya dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu yang cukup lama, yang menunjukkan efisiensi.

Program di RW 03 tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah. Ada banyak sumber dana yang digunakan, mulai dari swadaya masyarakat dan dukungan CSR dari BUMN seperti BNI, BRI, PLN, dan Pertamina hingga perusahaan swasta seperti Unilever (Djamaludin, wawancara pribadi, 21 April 2026). Pola pendanaan seperti ini menunjukkan kerja sama yang kuat di antara berbagai pihak. Selain itu, prinsip kolaborasi yang digariskan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.1 Tahun 2017 dalam pelaksanaan ProKlim juga didukung oleh metode ini. Program menjadi lebih stabil karena beban pembiayaan tidak bertumpu pada satu sumber melainkan dengan dukungan dari berbagai pihak.

Dalam hal pemanfaatan sumber daya manusia, penelitian lapangan menunjukkan bahwa tenaga warga lebih efisien daripada teknologi. Ini sesuai dengan contoh sebelumnya ketika RW 03 mencoba menggunakan mesin pencacah plastik pemberian dari Universitas Airlangga (UNAIR), namun, hasilnya produksi tidak sebanding dengan biaya bahan bakar yang dikeluarkan. Hal serupa terjadi lagi saat mendapatkan mesin pencacah plastik dari Kementrian pada tahun 2013 yang berbahan bakar solar, hingga pada akhirnya mesin tersebut tidak digunakan dengan baik dan terpaksa harus dijual (Djamaludin, wawancara pribadi, 21 April 2026). Warga mulai menyadari bahwa penggunaan teknologi tidak selalu merupakan pilihan yang paling efektif, terutama jika tidak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan di lapangan.

### 3. Kecukupan

Kecukupan dalam kerangka Dunn (2013) mencakup tidak hanya mengevaluasi pencapaian tujuan program, tetapi juga mengevaluasi apakah pencapaian tersebut benar-benar mampu menyelesaikan masalah kebijakan yang terkait. Artinya, ukuran kecukupan lebih menekankan pada seberapa cukup hasil program untuk memperbaiki kondisi yang dianggap bermasalah sebelumnya.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa lingkungan di RW 03 masih belum bebas dari masalah. Menurut narasumber, hampir tidak mungkin untuk mencapai kondisi tanpa masalah lingkungan. Namun, yang lebih penting untuk diperhatikan adalah sejauh mana masalah tersebut dapat ditangani. Dalam hal ini, tingkat penyelesaian masalah lingkungan di RW 03 diperkirakan sudah mencapai sekitar 70–80 persen, yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan wilayah lain di Kota Surabaya.

Kecukupan program untuk memenuhi kebutuhan warga secara bertahap juga menunjukkan kemampuannya. Pada awalnya, masalah utama di RW 03 adalah sampah, kondisi sanitasi yang buruk, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Namun, sebagian besar masalah mulai teratasi setelah waktu yang cukup lama. Setiap RT dalam lingkup RW 03 memiliki fasilitas sanitasi seperti saluran air dan IPAL, sampah sudah dikelola melalui sistem pengelolaan mandiri dan bank sampah yang bahkan menjadi nilai tambah ekonomi bagi warga, dan penghijauan sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari warga.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa program tersebut sudah mencapai tujuan dari sisi administratif dan memenuhi kebutuhan nyata masyarakat. Bahkan, kondisi di RW 03 saat ini sering digunakan sebagai lokasi studi banding oleh berbagai organisasi, mulai dari instansi pemerintah hingga pelajar atau mahasiswa dari berbagai daerah. (Djamaludin, wawancara pribadi, 21 April 2026)

### 4. Perataan (*Equity*)

Dalam model Dunn (2013), kriteria perataan menekankan bagaimana manfaat suatu program didistribusikan kepada masyarakat. Ini tergantung pada apakah program menjangkau semua kelompok secara merata atau tetap terfokus pada kelompok tertentu. Untuk ProKlim di RW 03 Jambangan, elemen ini sangat penting karena program lingkungan yang ideal harus dirasakan oleh semua orang, bukan hanya oleh sekelompok individu tertentu.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa manfaat program di RW 03 didistribusikan secara merata. Hal ini ditunjukkan oleh keterlibatan berbagai bagian kelompok masyarakat dalam pelaksanaan program. Para Ibu PKK mengelola bank sampah di setiap RT, dan karang taruna terlibat dalam beberapa kegiatan lingkungan. Selain itu, seluruh warga secara rutin berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti (Djamaludin, wawancara pribadi, 21 April 2026). Menariknya, menurut narasumber bahwa partisipasi tidak terbatas hanya pada kontribusi secara fisik, melainkan juga dapat berupa materi maupun fikiran. Masyarakat yang tidak memungkinkan berpartisipasi secara langsung tetap dapat berkontribusi (Djamaludin, wawancara pribadi, 21 April 2026). Mereka dapat melakukannya

dengan mendukung dana atau menyampaikan aspirasi mereka di forum musyawarah.

Keberadaan bank sampah di seluruh RT menunjukkan pola inklusif dari perspektif ekonomi. Dapat dipastikan bahwa setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Salah satu manfaat yang cukup dirasakan adalah sistem tabungan sampah yang dapat dicairkan setiap menjelang hari raya. Dalam beberapa situasi, warga bahkan mampu mengumpulkan jutaan rupiah dalam satu tahun. Hasil ini kemudian dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari atau disimpan dalam bentuk tabungan (Djamaludin, wawancara pribadi, 21 April 2026).

Selain itu, program ketahanan pangan di lingkungan RW memungkinkan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah untuk terlibat dalam mengelola lahan. Hasil panennya kemudian didistribusikan dan dijual kembali di lingkungan sekitar, sehingga memberikan manfaat lingkungan dan ekonomi bagi warga (Djamaludin, wawancara pribadi, 21 April 2026). Secara keseluruhan, pola pelaksanaan program di RW 03 menunjukkan bahwa manfaat program tidak hanya dirasakan oleh kelompok tertentu, tetapi juga tersebar di berbagai lapisan masyarakat, seperti yang terlihat dari keterlibatan lintas kelompok seklaigus manfaat yang dirasakan secara langsung oleh warga dalam kehidupan sehari-hari.

#### 5. Responsivitas

Responsivitas menurut kerangka Dunn (2013), mengacu pada seberapa baik suatu program dapat memenuhi kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat sekaligus mendorong partisipasi aktif dari pesertanya. Jadi, responsivitas bukan hanya tentang apakah program diterima atau tidak oleh masyarakat, melainkan tentang bagaimana orang-orang merespons dan bagaimana mereka berkontribusi pada program tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam ProKlim di RW 03 Jambangan cukup tinggi. Kesadaran terhadap lingkungan tidak muncul secara instan melainkan sudah berlangsung sejak lama yakni pada awal tahun 2000-an. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar warga cenderung langsung terlibat ketika program dimulai tanpa memerlukan banyak dorongan. Meskipun beberapa warga memilih untuk memberikan kontribusi dari segi keuangan, partisipasi dalam menjalankan kegiatan lainnya terus berlanjut. Yang menarik adalah responsivitas dari program ini bukan hanya sekedar melakukan kegiatan, tetapi sudah mencapai pola kebiasaan. Saat ini, warga sudah melakukan hal-hal seperti memilah sampah atau menjaga kebersihan lingkungan secara otomatis tanpa diingatkan lagi. Dengan kata lain, program tidak lagi hanya dianggap sebagai sebuah program, tetapi menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari oleh masyarakat (Djamaludin, wawancara pribadi, 21 April 2026).

#### 6. Ketepatan

Ketepatan (appropriateness), kriteria terakhir dalam kerangka Dunn (2013), pada dasarnya menentukan apakah pendekatan dan tujuan program relevan dengan masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, bukan hanya masalah program yang berjalan, tetapi juga apakah pekerjaan yang dilakukan benar-benar "sesuai" dengan kebutuhan industri. ProKlim di RW 03 Jambangan tampaknya memenuhi

sasaran. Orang-orang sudah mulai mengelola lingkungan sejak 2002 sebelum ada kebijakan resmi, jadi program ini tidak muncul dari udara. Dengan kata lain, ketika ProKlim muncul, fungsinya lebih mirip dengan memberikan arahan, dukungan, dan legitimasi untuk inisiatif yang sudah berjalan. Dalam situasi ini, kebijakan tampaknya tidak dipaksakan dari atas; sebaliknya, mereka sesuai dengan kebiasaan masyarakat yang sudah ada (Djamaludin, wawancara pribadi, 21 April 2026).

Selain itu, ProKlim yang berbasis komunitas masyarakat cukup sesuai dengan kondisi sosial RW 03 dari perspektif ketepatan. Banyak kegiatan dilakukan melalui musyawarah, kerja bakti, dan pemberdayaan kelompok lokal seperti PKK dan karang taruna. Pola ini berfokus pada partisipasi sehari-hari warga, yang membuatnya lebih cocok daripada pendekatan yang terlalu teknokratis (Djamaludin, wawancara pribadi, 21 April 2026). Selain itu, dalam perspektif lain, program ini juga sejalan dengan agenda SDGs, terutama SDGs ke-13 yang berkaitan dengan penanganan perubahan iklim.

**Table : 1 Ringkasan Evaluasi**

Kriteria	Indikator	Standar Keberhasilan	Capaian RW 03 Jambangan
Efektivitas	Pengelolaan sampah mandiri (pemilahan, kompos, daur ulang)	Setiap RT memiliki sistem pengelolaan sampah mandiri; pengurangan sampah ke TPA (PermenLHK P.84/2016)	- Seluruh RT 1-8 memiliki komposter dan bank sampah - Sampah dipilah organik-anorganik; PDU mengolah 5-7 ton/hari
	Kondisi kesehatan lingkungan (IPAL aktif, sanitasi bersih)	Potensi adanya penyakit endemik menurun, saluran air bersih, sanitasi layak	- Tidak ada penyakit membahayakan di warga; IPAL aktif di setiap RT - Air limbah didaur ulang untuk menyiram tanaman
	Ketahanan pangan dan	Adanya kegiatan pertanian dan penggunaan	Lahan pertanian (jagung, sayur)

	energi terbarukan	energi bersih (PermenLHK P.84/2016, komponen adaptasi & mitigasi)	dikelola warga miskin didampingi Dinas Pertanian dan solar cell aktif di RT 05
Efisiensi	Sumber dana multi-pihak (pemrintah + swadaya + CSR)	Program didanai secara kolaboratif, tidak bergantung satu sumber (prinsip kemitraan ProKlim, Perdirjen P.1/2017)	Dana dari swadaya warga + CSR beberapa BUMN, tidak ada kendala dana
	Penggunaan SDM berbasis tenaga manusia (tepat guna)	Efisiensi operasional; penggunaan teknologi tepat guna sesuai kapasitas komunitas	Pengelolaan lebih efisien berbasis tenaga manusia; penggunaan mesin (incinerator, pencacah plastik manual)
Kecukupan	Persentase penyelesaian permasalahan lingkungan dibanding wilayah lain	Pengurangan signifikan permasalahan lingkungan melampaui standar dibandingkan dengan wilayah sekitar lainnya	Tingkat penyelesaian masalah lingkungan di kisaran 70-80%, tertinggi dibanding wilayah lain di Surabaya
	Keberlanjutan program tanpa batas target	Program berjalan minimal 5 tahun berkesinambungan (PermenLHK P.84/2016)	Berjalan sejak 2002 (>22 tahun); warga memiliki kesadaran mandiri

Perataan (Equity)	Keterlibatan lintas kelompok masyarakat	Semua kelompok masyarakat terlibat secara aktif	PKK dominan di bank sampah, karang taruna terlibat, masyarakat berkontribusi sesuai dengan kemampuannya
	Distribusi manfaat ekonomi bank sampah merata ke semua warga	Manfaat program dirasakan oleh seluruh lapisan warga	Bank sampah di RT 1-8 terbuka untuk semua; hasil panen tahunan; ada warga mendapat Rp 6-7 juta per tahun dari tabungan bank sampah
Responsivitas	Tingkat inisiatif dan antusiasme warga sejak awal program	Keterlibatan aktif masyarakat sebagai tanda responsivitas positif	Warga langsung berinisiatif sejak 2002 tanpa banyak dorongan; kesadaran lingkungan sudah menjadi bagian dari identitas warga
	Pengakuan eksternal sebagai destinasi studi banding	Program diakui dan direplikasi oleh pihak lain sebagai bukti relevansi program	Menjadi rujukan studi banding instansi pemerintah, tempat pembelajaran siswa SD-SMP, dan 'tempat

			sinau' lingkungan rujukan Pemkot Surabaya
Ketepatan	Kesesuaian pendekatan bottom-up dengan kebutuhan komunitas	Program menjawab permasalahan nyata yang dirasakan warga	Program tumbuh dari inisiatif warga sejak tahun 2002, musyawarah menjadi mekanisme utama penyelesaian masalah
	Kontribusi terhadap SDGs (11, 13, 15)	Program relevan dan berkontribusi nyata terhadap target SDGs	- SDG 11: pengelolaan sampah & IPAL - SDG 13: solar cell & kompos mitigasi GRK - SDG 15: penghijauan & pertanian lokal

## Pembahasan

Evaluasi kebijakan Program Kampung Iklim (ProKlim) di RW 03 Kelurahan Jambangan dilakukan dengan mengkaji hasil temuan lapangan dan wawancara secara mendalam untuk kemudian dikaitkan dengan tujuan kebijakan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim serta kontribusinya terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Evaluasi ini penting dilakukan karena tidak hanya berfungsi untuk membuktikan nilai suatu program tetapi juga untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kinerja program secara berkelanjutan agar kebijakan yang ada benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Pembahasan ini tidak hanya melihat seberapa jauh program berjalan, tetapi juga menganalisis apakah program benar-benar mampu berkontribusi dalam mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di tingkat lokal serta mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Studi ini menggunakan enam

---

kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan (*equity*), responsivitas, dan ketepatan.

1. Efektivitas

Efektivitas dipahami sebagai sejauh mana kebijakan dapat mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran utama ProKlim adalah untuk mendorong masyarakat melakukan langkah-langkah dalam beradaptasi dan memitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan serta memperkuat ketahanan lingkungan di tingkat lokal. Jika dilihat dari tujuan tersebut, hasil yang diperoleh di RW 03 menunjukkan tingkat efektivitas yang sangat baik. Penemuan yang paling mencolok adalah adanya sistem pengelolaan sampah mandiri yang menyeluruh di semua RT 1 sampai RT 8 dalam lingkup RW 03. Setiap RT sudah memiliki komposter, fasilitas pemisahan sampah organik dan anorganik, serta bank sampah yang aktif. Sampah yang tidak dapat diolah di tingkat RT kemudian dikirim ke Pusat Daur Ulang (PDU) Jambangan yang bisa mengolah sekitar 5 sampai 7 ton sampah setiap hari. Situasi ini memberikan keuntungan ekonomi yang nyata bagi penduduk serta mengurangi tekanan pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang jelas berhubungan dengan komponen adaptasi terhadap perubahan iklim. Ini selaras juga dengan penelitian oleh (Shaqnasia et al., 2024) dalam evaluasi ProKlim di Kelurahan Margo Mulyo yang menegaskan bahwa sistem pengelolaan sampah mandiri berbasis RT merupakan indikator keberhasilan program yang paling jelas dan terukur.

Dari perspektif pengurangan emisi gas rumah kaca, RW 03 menciptakan sumber energi alternatif berupa panel surya di RT 05 yang dimanfaatkan untuk kegiatan kafe dan pompa air cuci tangan sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada listrik dari PLN. Inisiatif ini adalah tindakan nyata dalam upaya mengatasi perubahan iklim yang selaras dengan elemen mitigasi sesuai dengan Peraturan Menteri LHK P.84/2016. Dalam aspek ketahanan pangan, salah satu unsur adaptasi dalam ProKlim RW 03 yaitu membangun area pertanian yang ditanami jagung dan sayuran yang dikelola oleh masyarakat dengan pendapatan rendah dan mendapatkan bimbingan dari Dinas Pertanian Kota Surabaya serta hasil panennya dibagikan dan dijual di lingkungan sekitarnya.

Dari sudut pandang kesehatan lingkungan, situasi di RW 03 terbilang positif. Menurut informasi yang disampaikan oleh Ketua RW 03, tidak terdapat penyakit di area tersebut dan setiap RT telah dilengkapi dengan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang mampu mengolah limbah rumah tangga menjadi air yang bisa dimanfaatkan kembali untuk keperluan menyiram tanaman. Prestasi paling mencolok dari keberhasilan ini adalah penghargaan ProKlim Lestari yang diterima dari KLHK pada tahun 2021 yang merupakan penghargaan tertinggi dalam program ini, di mana RW 03 juga telah mendukung sembilan RW lainnya di Kota Surabaya. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa dampak ProKlim di RW 03 tidak hanya bersifat internal tetapi juga memberikan efek positif ke luar melalui upaya pembinaan di wilayah lainnya.

## 2. Efisiensi

Efisiensi berhubungan dengan analisis antara usaha serta biaya yang diinvestasikan dan hasil yang dicapai. Suatu program dapat disebut efisien jika penggunaan sumber daya finansial maupun SDM sebanding atau bahkan kurang dari keuntungan yang didapat. Dalam situasi ProKlim di RW 03, efisiensi program tercermin melalui dua elemen penting, yaitu model pendanaan yang melibatkan berbagai pihak dan pemilihan pemanfaatan sumber daya manusia sebagai penggerak utama. Dari aspek pembiayaan, program di RW 03 tidak hanya mengandalkan dana dari pemerintah. Sejak awal kegiatan pengelolaan lingkungan dimulai, warga sepakat untuk menggunakan swadaya yang meliputi iuran dan partisipasi mandiri masyarakat sebagai dasar utama pembiayaan. Seiring berjalannya waktu adanya dukungan dari CSR sejumlah perusahaan juga mulai berdatangan termasuk dari BUMN seperti BNI, BRI, PLN, Pertamina, serta perusahaan swasta seperti Unilever yang sejak awal tahun 2000-an terlibat dalam program pengelolaan sampah di kawasan ini bersama UNESA dan Dinas Pekerjaan Umum. Model pembiayaan kolaboratif antar sektor ini menekankan bahwa keberlanjutan program sangat tergantung pada kemampuan untuk menciptakan sinergi pendanaan dari berbagai sumber agar tidak rentan terhadap ketergantungan pada satu sumber dana. Click or tap here to enter text. dalam kajian mereka mengenai tata kelola kolaboratif, yaitu tata kelola yang melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaan ProKlim di Kelurahan Talangbubuk menemukan bahwa program kampung iklim yang melibatkan berbagai pihak dalam proses anggaran terbukti lebih tahan lama dan tidak mudah terhenti meskipun ada pergantian pemimpin atau perubahan dalam kebijakan pemerintah.

Dari aspek penggunaan SDM, di RW 03 menunjukkan bahwa penggunaan teknologi modern tidak selalu meningkatkan efisiensi. Saat Pusat Daur Ulang (PDU) pertama kali dibentuk, pengelola berusaha menggunakan mesin pencacah sampah plastik hasil kerja sama dengan UNESA. Tetapi setelah digunakan, biaya bahan bakar yang diperlukan ternyata jauh lebih tinggi dibandingkan dengan hasil yang diperoleh ditambah dengan kondisi mata gergaji yang cepat tumpul sehingga produksi menjadi tidak maksimal. Masalah yang sama kembali muncul ketika pada tahun 2013 Kementerian memberikan sumbangan mesin pengrajang plastik berukuran besar berbahan bakar solar. Karena biaya operasionalnya terlalu tinggi dan tidak sebanding dengan hasil yang didapatkan, mesin tersebut akhirnya tidak digunakan dan harus dijual. Dari dua pengalaman tersebut, warga RW 03 belajar hal yang penting yaitu pengelolaan yang mengandalkan tenaga manusia meskipun terlihat lebih tradisional justru lebih efisien, fleksibel, dan lebih cocok dengan kapasitas yang ada di komunitas. Prinsip ini sejalan dengan ide teknologi yang tepat guna dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu pilihan teknologi yang disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan konteks sosial komunitas agar bisa menjadi solusi bukan beban. (Rinwantin et al., 2025) dalam studi tentang optimalisasi bank sampah menyatakan bahwa efisiensi dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas lebih banyak dipengaruhi oleh kualitas partisipasi manusia dibandingkan dengan canggihnya teknologi yang digunakan, terlebih jika

---

komunitas tersebut belum memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk merawat teknologi tersebut dengan berkelanjutan.

### 3. Kecukupan

Kecukupan tidak sekadar menilai apakah tujuan dari program dapat tercapai tetapi lebih dalam lagi bertanya apakah hasil yang didapat benar-benar mampu memberikan solusi yang berarti bagi masalah kebijakan yang ada. Hal ini menjelaskan bahwa ukuran kecukupan lebih menyoroti seberapa efektif hasil program dalam memperbaiki situasi yang sebelumnya dianggap bermasalah dan dirasakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Jika dilihat dari kondisi awal RW 03 sebelum dimulainya program pengelolaan lingkungan pada tahun 2002, terdapat tiga isu utama yang menjadi latar belakang munculnya inisiatif warga. Pertama, masalah sampah yang menumpuk dan tidak terkelola dengan baik. Kedua, sanitasi yang buruk akibat ketiadaan sistem pengolahan air limbah yang efektif. Ketiga, kurangnya kesadaran warga tentang pentingnya menjaga lingkungan. Saat ini, ketiga masalah ini telah sebagian besar teratasi. Sampah kini tidak lagi dibiarkan menumpuk melainkan dikelola secara teratur melalui bank sampah di setiap RT bahkan memberikan nilai ekonomi tambahan bagi masyarakat. Sistem sanitasi di tiap RT telah dilengkapi dengan saluran air yang baik dan instalasi pengolahan air limbah yang berfungsi dengan baik. Kegiatan penghijauan telah menjadi kebiasaan harian yang dilakukan oleh semua warga. Narasumber memperkirakan bahwa tingkat penyelesaian isu lingkungan di RW 03 sudah mencapai sekitar 70% hingga 80%, angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain di Kota Surabaya. (Riani et al., 2024) dalam studi mengenai pelaksanaan ProKlim di Kabupaten Magelang mengungkapkan bahwa program-program kampung iklim yang telah berjalan lebih dari 10 tahun secara konsisten menunjukkan tingkat penyelesaian masalah lingkungan yang jauh lebih tinggi karena masyarakat telah memiliki sistem, kebiasaan, dan kapasitas yang terintegrasi dalam pengelolaan lingkungan mereka.

Perlu ditekankan bahwa narasumber dengan tulus mengakui bahwa menciptakan lingkungan yang sepenuhnya tanpa masalah merupakan sesuatu yang hampir tidak mungkin dilakukan. Tetapi justru ketidakpuasan ini yang mendorong masyarakat untuk terus berupaya memperbaiki keadaan lingkungan tanpa batas waktu dan tanpa tujuan akhir yang kaku. Program ini tidak memiliki sasaran yang ditetapkan sepihak oleh pihak atasan sehingga masyarakat tidak berhenti berinovasi hanya karena suatu indikator telah tercapai. Keadaan ini mengharuskan ProKlim beroperasi secara berkelanjutan setidaknya selama 5 tahun, sedangkan RW 03 telah berjalan lebih dari 22 tahun sejak tahun 2002. Prestasi di RW 03 telah melampaui batas internal wilayah tersebut karena daerah ini kini menjadi lokasi studi untuk berbagai lembaga pemerintah, tempat pembelajaran bagi siswa dari SD hingga SMP, serta diakui oleh Pemerintah Kota Surabaya sebagai "tempat sinau" yang berarti tempat belajar terkait dengan pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

#### 4. Perataan (*Equity*)

Kriteria perataan (*equity*) menyoroiti sejauh mana keuntungan dari suatu program disebarkan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat bukan hanya kepada kelompok tertentu yang sudah terlibat atau memiliki keunggulan tertentu. Sebuah program lingkungan yang ideal seharusnya dapat memberikan keuntungan kepada semua individu, baik dalam hal partisipasi maupun manfaat yang diperoleh tanpa adanya diskriminasi berdasarkan status ekonomi atau kemampuan fisik seseorang. Peneliti lapangan di RW 03 menunjukkan pola distribusi manfaat yang inklusif dan menjangkau berbagai kelompok masyarakat. Para ibu-ibu yang tergabung dalam organisasi PKK memiliki peranan paling utama dalam pengelolaan bank sampah di setiap RT mulai dari menimbang, mencatat, hingga mengelola keuangan tabungan sampah. Selain itu, karang taruna juga terlibat dalam berbagai kegiatan lingkungan meskipun tidak seaktif kelompok ibu-ibu PKK. Seluruh warga juga secara rutin ikut serta dalam kegiatan gotong royong membersihkan saluran air dan lingkungan sekitar. Hal menarik dari model partisipasi di RW 03 adalah sifatnya yang fleksibel yaitu warga yang tidak mampu memberikan kontribusi fisik tetap bisa berkontribusi melalui sumbangan uang atau dengan mengemukakan ide dan aspirasi dalam forum diskusi. Ini memastikan bahwa tidak ada warga yang merasa tidak dapat berkontribusi sehingga rasa kepemilikan terhadap program dan lingkungan berkembang secara merata di seluruh lapisan masyarakat. (Rusdiyana et al., 2024) dalam studi mereka tentang pemberdayaan masyarakat melalui inisiatif bank sampah menemukan bahwa keterlibatan lintas kelompok khususnya dengan menjadikan perempuan sebagai aktor utama dalam pengelolaan secara signifikan meningkatkan keberlanjutan program dan memperkuat hubungan sosial di antara warga.

Dari sudut pandang ekonomi, adanya bank sampah di RT 1 sampai RT 8 memberikan peluang yang sama kepada seluruh penduduk untuk memperoleh tambahan penghasilan. Sistem yang diterapkan adalah transparan dan berlaku untuk setiap individu yang berarti siapa saja diperbolehkan untuk menyetor sampah yang kemudian ditimbang, dicatat, dan disimpan sebagai tabungan yang bisa dicairkan menjelang hari besar. Selain konsep tabungan ini, bank sampah di RW 03 juga menerapkan sistem pinjam meminjam di mana warga dapat meminjam dana dan mengembalikannya dengan Sisa Hasil Usaha (SHU). Hasil yang diperoleh sangat signifikan, terdapat warga yang mampu mengumpulkan tabungan sampah hingga 6 sampai 7 juta rupiah dalam setahun yang tentunya suatu jumlah yang sangat berarti bagi keluarga berpendapatan rendah. Temuan ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rinwantin et al., 2025) yang menunjukkan bahwa pemanfaatan bank sampah tidak hanya berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara nyata terutama bagi kelompok masyarakat yang paling rentan secara finansial.

Dimensi perataan juga terlihat dalam inisiatif ketahanan pangan di RW 03. Area pertanian ditanam jagung dan berbagai sayuran yang dikelola khusus oleh masyarakat berpenghasilan rendah dengan bantuan dari staf Dinas Pertanian Kota

---

Surabaya. Inisiatif ini tidak hanya memberikan keuntungan kepada warga yang sudah stabil secara finansial tetapi lebih diutamakan untuk menyediakan peluang pendapatan bagi mereka yang sangat memerlukan. Hasil dari panen kemudian dipasarkan kepada penduduk di sekitar RW sehingga menciptakan dua keuntungan yaitu pendapatan untuk pengelola lahan dan akses terhadap produk pangan lokal yang terjangkau bagi seluruh komunitas. Model distribusi manfaat seperti ini adalah contoh konkret dari program lingkungan yang tidak mengabaikan kelompok rentan dan sesuai dengan prinsip "tidak ada yang tertinggal" dalam agenda SDGs global.

#### 5. Responsivitas

Responsivitas menilai sejauh mana sebuah program dapat memenuhi keinginan dan nilai yang ada dalam masyarakat serta seberapa besar masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam keberlangsungan sehari-harinya. Responsivitas bukan sekadar penerimaan yang pasif terhadap program melainkan keterlibatan aktif yang muncul dari dalam komunitas itu sendiri. Di RW 03 tingkat responsivitas warga terhadap ProKlim bisa dibilang sangat tinggi bahkan melebihi respons terhadap program itu sendiri. Ini disebabkan oleh kesadaran dan inisiatif lingkungan di RW 03 yang sebenarnya tidak muncul dari ProKlim melainkan telah ada jauh sebelumnya. Jauh sebelum ProKlim resmi diperkenalkan pada 2012, masyarakat di RW 03 telah secara mandiri membangun sistem pengelolaan sampah, memfasilitasi PDU, dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengelola lingkungan mereka. Ketika ProKlim hadir secara resmi, warga merespons dengan penuh semangat dan berinisiatif untuk mendaftar tanpa perlu dorongan tambahan dari luar. Bahkan bagi warga yang tergolong dalam kategori mapan secara ekonomi, bentuk respon mereka tidak selalu terlihat dengan keterlibatan fisik tetapi sebagian dari mereka memilih untuk berkontribusi melalui sumbangan dana yang juga dianggap sebagai bentuk partisipasi yang setara oleh komunitas. (Dailiati et al., 2022) dalam studi mereka menunjukkan bahwa keberhasilan ProKlim sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pemahaman dan kesadaran masyarakat yang telah ada sebelumnya. Di RW 03, kesadaran ini telah tertanam dengan kuat bahkan sebelum program tersebut diresmikan.

Dari sisi responsivitas, yang paling menonjol di RW 03 adalah perubahan perilaku yang berkembang dari sekadar "mengikuti program" menjadi "gaya hidup" yang sesungguhnya. Saat ini aktivitas seperti memilah sampah sebelum dibuang, menjaga kebersihan saluran air, merawat tanaman di depan rumah, serta berkontribusi dalam kerja bakti sudah dilakukan oleh masyarakat dengan sendirinya tanpa perlu diingatkan dan tanpa arahan dari ketua RT atau RW. Program-program kini tidak lagi dianggap sebagai suatu kewajiban yang datang dari otoritas pemerintah, tetapi telah bertransformasi menjadi bagian penting dari karakter komunitas RW 03 sebagai kampung yang peduli dengan lingkungan. Dalam istilah sosial situasi ini dikenal sebagai internalisasi nilai yang berarti nilai-nilai yang sebelumnya berasal dari luar telah meresap dan menjadi komponen dari sistem nilai individu atau komunitas dengan perilaku yang diharapkan muncul secara alami tanpa adanya paksaan. Penghargaan luar atas tingkat responsivitas yang tinggi ini muncul dalam berbagai cara yaitu RW 03 menjadi lokasi studi

banding bagi instansi pemerintah dari sejumlah daerah, menjadi tempat pembelajaran lapangan bagi siswa SD hingga SMP, serta diakui oleh Pemerintah Kota Surabaya sebagai salah satu tempat belajar tentang lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Bukti konkret dari program setelah lebih dari 20 tahun ditunjukkan melalui tiga indikator keberhasilan yang disampaikan langsung oleh narasumber, yaitu tidak adanya penyakit berbahaya di kawasan warga, sampah yang sekarang memiliki nilai ekonomi lewat bank sampah, serta pengakuan terhadap RW 03 sebagai acuan nasional untuk pengelolaan lingkungan yang berbasis komunitas.

#### 6. Ketepatan

Ketepatan berarti mengevaluasi apakah metode yang diterapkan dengan tujuan yang ditetapkan dalam suatu program benar-benar sesuai dan relevan dengan tantangan yang dihadapi oleh komunitas target. Di RW 03, ProKlim bukanlah sebuah program yang tiba-tiba muncul dan meminta masyarakat untuk mengubah kebiasaan mereka, tetapi warga sudah terlebih dahulu beradaptasi dan bergerak sementara ProKlim hadir untuk memberikan pengakuan, arahan, serta dukungan resmi bagi upaya yang telah berlangsung. Pengelolaan sampah yang mandiri sudah dimulai oleh inisiatif warga sejak tahun 2002 sebagai respons terhadap masalah sampah yang terus meningkat setiap tahunnya. Sepuluh tahun kemudian ketika ProKlim resmi diluncurkan pada tahun 2012, RW 03 mendapat saran dari Pemerintah Kota Surabaya untuk mendaftar karena aktivitas yang telah mereka lakukan sudah memenuhi kriteria program tersebut. Dengan kata lain, kesesuaian ProKlim di RW 03 tidak berasal dari perancangan program yang dikhususkan untuk wilayah ini tetapi karena nilai-nilai serta kegiatan yang telah dijalankan oleh masyarakat secara alami ternyata sejalan dengan tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Keadaan ini memperkuat argumen yang disampaikan dalam tinjauan implementasi ProKlim di Indonesia (Riani et al., 2024) bahwa ProKlim yang paling sukses adalah yang berakar dari inisiatif lokal dan kemudian diperkuat oleh kebijakan resmi dari pihak atas, bukan yang dijalankan semata-mata karena adanya perintah atau kewajiban administratif.

Ketepatan ProKlim terlihat jelas melalui cara pelaksanaannya yang sangat sejalan dengan karakter sosial budaya di masyarakat RW 03. Seluruh kegiatan program mulai dari tahap perencanaan hingga penyelesaian masalah dilaksanakan melalui dialog musyawarah yang melibatkan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) bersama semua ketua RT dan RW sebelum keputusan disampaikan kepada warga melalui pertemuan tatap muka maupun platform media sosial. Pendekatan ini lebih sesuai dengan karakteristik komunitas yang sudah terbiasa dalam pengambilan keputusan secara bersama-sama dibandingkan dengan jika program diimplementasikan secara birokratis dari atas. Dari sudut pandang yang lebih luas, program ini menunjukkan kesesuaian dalam hal kontribusinya terhadap agenda SDGs. Secara spesifik, ProKlim di RW 03 berkontribusi pada SDGs 11 melalui sistem pengelolaan sampah yang mandiri dan IPAL di masing-masing RT yang mendukung lingkungan yang bersih dan berkelanjutan, pada SDGs 13 melalui penggunaan *solar cell* dan sistem pengomposan

---

yang mengurangi emisi gas rumah kaca, serta pada SDGs 15 melalui penghijauan dan pengembangan pertanian lokal yang menjaga ekosistem darat di tengah tekanan urbanisasi Kota Surabaya. RW 03 menjadi salah satu contoh konkret bagaimana komitmen global tersebut diterapkan dalam aksi nyata pada tingkat komunitas terkecil.

## SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Program Kampung Iklim (Proklim) di RW 03 Kelurahan Jambangan telah berevolusi dari kebijakan lingkungan konvensional menjadi model aksi iklim yang integratif dan berkelanjutan. Evaluasi berdasarkan kriteria William N. Dunn menunjukkan pencapaian efektivitas di atas standar prosedural. Hal ini tercermin dari kemandirian pengelolaan sampah dan penguatan ketahanan pangan, yang berdampak langsung pada indikator Sustainable Development Goals (SDGs). Selain itu, efisiensi pemanfaatan sumber daya serta tingkat kecukupan program (70–80%) membuktikan kemampuan inisiatif lokal berbasis kolektif dalam mengatasi tantangan lingkungan perkotaan secara sistematis. Keberhasilan tersebut menjadikan RW 03 sebagai pusat inovasi lingkungan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan visi mitigasi perubahan iklim nasional. Kesimpulan ini menegaskan bahwa keberlanjutan ProKlim bergantung pada sinergi antara kesadaran intrinsik masyarakat dan dukungan kelembagaan yang konsisten. Berbeda dengan wilayah lain yang sering terhambat oleh lemahnya pengawasan dan sosialisasi dari dinas terkait, RW 03 telah membentuk ekosistem sosial di mana partisipasi aktif menjadi norma budaya, bukan sekadar kewajiban administratif. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan replikasi model berbasis komunitas ini di wilayah lain dengan penyesuaian terhadap karakteristik lokal. Untuk penelitian mendatang, disarankan analisis kuantitatif mendalam tentang reduksi emisi gas rumah kaca secara spesifik. Selain itu, kajian strategi penguatan kapasitas teknologi diperlukan agar dampak positif ProKlim dapat diukur lebih presisi pada skala yang lebih luas.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Tauran, S.Sos., M.Soc.Sc., dan Ibu Wilda Sumarsyah, M.A.P., selaku dosen pengampu mata kuliah Evaluasi Kebijakan di Universitas Negeri Surabaya, atas bimbingan dan arahan yang diberikan. Penulis juga mengapresiasi secara mendalam kontribusi Bapak Djamaludin, selaku Ketua RW 03 Kelurahan Jambangan yang telah bersedia menjadi narasumber utama serta memberikan dukungan penuh selama penelitian. Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh warga RW 03 atas partisipasi dan data yang disediakan serta kepada rekan-rekan Kelompok 8 atas kerja sama yang erat. Terakhir, penulis berterima kasih kepada redaksi Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum atas kesempatan mempublikasikan artikel ilmiah ini.

---

---

## DAFTAR RUJUKAN

- ANTARA News. (2023). *Surabaya targetkan ribuan kampung iklim pada 2024*.  
<https://www.antaranews.com/berita/3824760/surabaya-targetkan-ribuan-kampung-iklim-pada-2024>
- Ardian, I., Rawamangun Muka Raya, J., Timur, J., Jakarta, D., Info, A., & History, A. (2025). ANALISIS SDG 13: DAMPAK PERUBAHAN IKLIM GLOBAL PADA FENOMENA CUACA EKSTREM DI TAHUN 2024. In *Jurnal Ilmu Sains dan Teknologi* (Vol. 1, Number 1).
- Badan Meteorologi, K. dan G. (BMKG). (2025). *Pengertian Iklim dan Penjelasan Lengkapnya*. <https://gaw-bariri.bmkg.go.id/index.php/karya-tulis-dan-artikel/gawsarium/228-iklim>
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2023). *Peta Jalan SDGs 2023-2030*.  
<https://sdgs.bappenas.go.id/product/peta-jalan-sdgs-2023-2030-idn/>
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2025). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029*.  
<https://www.bappenas.go.id/datapublikasishow?q=Rencana+Pembangunan+dan+Rencana+Kerja+Pemerintah&jenis=RPJMN&tahun=2025>
- Dailiati, S., Hernimawati, & Sudaryanto. (2022). Program Kampung Iklim di Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Pelatihan*, 6(1), 88–93.
- Hayatulah, G. E., Mahasari, J., Ihsan, M., Wicaksono, M. B. A., & Alhamda, S. (2023). Kebijakan lingkungan dalam menanggapi permasalahan perubahan iklim di Indonesia: Sebuah tinjauan integratif. *Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah*.
- Hudaya, M. R., & Dewi, T. P. (2021). Collaborative Governance Dalam Implementasi Program Kampung Iklim Di Kelurahan Talangbubuk, Kecamatan Plaju, Kota Palembang. *KOMUNITAS: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 12(1), 1–10.  
<https://doi.org/10.20414/komunitas.v12i1.3355>
- Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. (2026). *Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemenerian Lingkungan Hidup Tahun 2026*. <https://kemenlh.go.id/news/detail/daftar-isian-pelaksanaan-anggaran-dipa-kementerian-lingkungan-hidup-tahun-2026>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim*.  
<https://peraturan.go.id/id/permen-lhk-no-p-84-menlhk-setjen-kum-1-11-2016-tahun-2016>
- Miles, M. B. , Huberman. A. M. , & Saldaña. J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Mool, A. P. S., Rachman, E., & Pariono, A. (2025). Partisipasi masyarakat dalam implementasi Program Kampung Iklim (ProKlim) di Desa Bulota Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo. *Publicness: Journal of Public Administration Studies*, 4(3).

- Muhammad Miftah Farid, & Juliannes Cadith. (2025). Evaluasi Program Kampung Iklim sebagai Upaya Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan di Kampung Airport Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara*, 2(4), 72–87. <https://doi.org/10.62383/hukum.v2i4.376>
- Pemerintah Kota Surabaya. (2024). *Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 92 Tahun 2024 tentang Program Kampung Iklim di Kota Surabaya (Nomor 92 Tahun 2024)*. <https://jdih.surabaya.go.id/peraturan/4532>
- Putri, D. A., Arifana, D. W., Kalimatussadah, N., Nurzahra, N., & Rosana, M. (2025). Implementation of the climate village program by the environmental agency in RW 20, Haurpanggung Village, Garut Regency. *ARSY: Aplikasi Riset kepada Masyarakat*, 6(3), 841-846.
- Raditya, A., Suwartiningsih, S., & Siahainenia, R. R. (2025). Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative> Kontribusi Program Kampung Iklim Dalam Mendukung Capaian SDGs di Tingkat Lokal: Studi Pengalaman Masyarakat Kelurahan Mangunsari. *Journal Of Social Science Research*, 5, 7743–7757. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Riani, A., Suwitri, S., & Kurniasih, Y. (2024). Implementasi Program Kampung Iklim (Proklim) di Desa Sambak, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang. *JPALG: Journal of Public Administration and Local Governance*, 8(1), 28–40. <https://doi.org/10.31002/jpalg.v8i1.8620>
- Rinwantin, Izzaty, K. N., Pujiastuti, Y., Yuliana, R., & Wahyuni, A. N. (2025). Optimalisasi Bank Sampah Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Dan Pelestarian Lingkungan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*, 3(4), 361–367. <https://doi.org/10.58266/jpmb.v3i4.160>
- Rusdiyana, E., Sugihardjo, Setyowati, R., Widiyanto, & Lestari, E. (2024). Pemberdayaan masyarakat melalui inisiasi bank sampah. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 7(3), 703–719. <https://doi.org/10.33474/jipemas.v7i3.21259>
- Shaqnasia, E., Mustofa, U., Kadri, M. K., & Syafitri, E. D. (2024). Evaluasi Program Kampung Iklim (PROKLIM) Kelurahan Margo Mulyo, Kecamatan Balikpapan Barat. *Compact: Spatial Development Journal*, 03(01), 280–286.
- Sisca Indriyani, Sunarto Sunarto, & Muhammad Indrawan. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Program Kampung Iklim Berbasis Partisipasi Masyarakat (Studi Kasus Di Rw 09, Kelurahan Pucangsawit). *Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia*, 13(3), 109–124. <https://doi.org/10.32315/jlbi.v13i3.366>
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.